



Analisis Internal Audit Terhadap Pencegahan Fraud

Syamsiah Paro ^{1*}, Masdar Mas'ud ² Hamzah Ahmad ²

* syamsiah.paro@umi.ac.id

^{1,2,3} Universitas Muslim Indonesia, Sulawesi Selatan, Indonesia

ISSN : 2621-8186 (Online)
ISSN : 2621-8194 (Print)

*Koresponden:
syamsiah.paro@umi.ac.id

Riwayat Artikel

Masuk:
21 Desember 2020
Direvisi:
04 Januari 2021
Diterima:
17 Januari 2021

Abstract : Penelitian ini dilakukan dengan tujuan: (1) Untuk menganalisis peran Audit internal dalam mencegah kecurangan yang terjadi di RS. Sulthan Daeng Radja Bulukumba. (2). Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan audit internal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui wawancara kepada informan yang ditentukan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa (1). Internal auditor pada Rumah sakit Sulthan Daeng Radja sudah menerapkan pengendalian internal dalam upaya mencegah terjadinya Fraud. (2). Dalam melaksanakan tugas internal audit, masih terkendala oleh beberapa faktor seperti kualitas SDM, Kesadaran pegawai, dan masih lemahnya pengawasan interen.

Kata Kunci: Internal Audit, Satuan Pengawas Internal, Fraud

 This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Pendahuluan

Pergeseran paradigma (paradigm shift) dari model administrasi publik yang tradisional (old public administration) yang begitu dominan di abad 20 menuju manajerialism atau manajemen publik (new public management) yang menitikberatkan pada customer service. Pergeseran paradigma ini berdampak terhadap seluruh sektor pelayanan publik tidak terkecuali sektor perumahsakit (Arfah, 2011) . Dengan sumber daya yang unggul, perusahaan mampu melakukan strategi bisnis apa saja, yang pada akhirnya membawa perusahaan memiliki keunggulan kompetitif (Arianie & Puspitasari, 2017). Ini adalah cara pandang alternatif terhadap market-based theory yang menjadi mainstream pemikiran manajemen strategik saat ini.

Permendagri No. 79 Tahun 2018 tentang BLUD menyebutkan bahwa rumah sakit pemerintah dengan status BLUD sebagai unit kerja dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan prinsip efisien dan produktivitas dengan menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat sesuai kaidah manajemen yang baik dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan bermutu serta berkesinambungan guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Teori Konsep Kinerja Pelayanan Publik dapat diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan. Menurut (Romauli Situmeang, 2017) mengatakan kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program kebijaksanaan dalam mewujudkan sarana, tujuan, misi dan visi organisasi. Sedangkan (Yuyun, 2016) mengemukakan bahwa dalam instansi pemerintah khususnya untuk penilaian kinerja sangat berguna untuk menilai kuantitas, kualitas dan efisiensi pelayanan, memotivasi para birokrat pelaksana, menyesuaikan budget, mendorong pemerintah agar lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat yang dilayani dan menuntun perbaikan dalam pelayanan publik.

Komariyatun et al., (2014) mengemukakan bahwa selama ini, citra rumah sakit pemerintah relatif lebih buruk dibanding rumah sakit swasta di mata masyarakat. Pelayanan yang buruk seperti antrian yang panjang, pelayanan yang kurang ramah dan profesional dari petugas medis, pasien sering ditelantarkan

dalam waktu yang relatif lama, serta fasilitas sarana dan prasarana kesehatan yang kurang memadai merupakan citra yang melekat pada rumah sakit milik pemerintah. Kondisi tersebut menyebabkan berkurangnya kenyamanan pasien dalam berobat di rumah sakit pemerintah sehingga tingkat kepuasan pasiennya rendah. Jika pengelolaan rumah sakit pemerintah tidak segera dibenahi, maka mengakibatkan penurunan minat masyarakat untuk berobat ke rumah sakit pemerintah, kemudian muncul pencitraan bahwa rumah sakit milik pemerintah identik dengan pelayanan kesehatan untuk masyarakat kalangan bawah, serta memposisikan rumah sakit pemerintah kurang siap menghadapi globalisasi jasa dalam Asean Economic Community (AEC) yang dimulai tahun 2015 (Sadikin & Adisasmito, 2016). (Pakadang, 2012) menjelaskan bahwa dengan adanya fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan BLUD pada RSUD diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan dan kinerja keuangan sehingga rumah sakit mampu memberikan pelayanan kesehatan yang optimal dan dapat bersaing dengan kompetitornya Penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD memberikan peluang bagi RSUD untuk bertindak lebih responsif dan agresif dalam menghadapi tuntutan masyarakat dan eskalasi perubahan yang cepat di bidang kesehatan dengan cara melaksanakan prinsip-prinsip ekonomi yang efektif dan efisien, namun tidak meninggalkan jati dirinya dalam mengemban misi sosial untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan publik.

Menurut (Wardhani, 2013) beberapa rasio yang digunakan untuk menilai kinerja laporan keuangan daerah seperti Rumah Sakit Umum Daerah yang sudah resmi menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah rasio kemandirian yaitu menunjukkan kemampuan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam membiayai sendiri kegiatan pelayanan, pemerintahan dan pembangunan. Rasio efektifitas yaitu kemampuan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam merealisasikan penerimaan yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dan rasio efisiensi yaitu perbandingan antara realisasi biaya dengan realisasi penerimaan yang diterima. Rumah sakit Umum daerah Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba, sebagai BLUD tentunya memiliki harapan yang sama dengan rumah sakit lainnya dalam hal meningkatkan kinerja keuangannya maupun kinerja non keuangan. Sebagai ilustrasi kinerja keuangan Rumah sakit Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel.1. Perkembangan Pendapatan Operasional 2012-2019

Tahun	Realisasi Pendapatan Operasional	% Kenaikan Pendapatan
2012	19.034.721.733	-
2013	23.350.301.058	23 %
2014	34.102.148.275	46 %
2015	43.696.398.341	28 %
2016	55.001.207.406	26 %
2017	72.568.887.971	31%
2018	65.220.245.252	-10%
2019	90.788.377.680	39%
Rata-Rata	50.470.285.965	26 %

Berdasarkan tabel 1, diatas, bahwa sejak tahun 2012 sampai dengan 2019, terjadi peningkatan pendapatan operasional Rumah Sakit Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba, kecuali pada tahun 2018, mengalami penurunan. Hal ini menunjukan bahwa trend peningkatan ini berimplikasi pada keberhasilan menejemen Rumah Sakit dalam menciptakan pendapatan.

Evolusi Paradigma Layanan Publik, Dalam landasan teoritis ini, peneliti mengawalinya dengan kajian masalah pelayanan publik dalam pendekatan administrasi publik atau negara sebagai grand theory, hal ini untuk menjustifikasi kondisi objektif penelitian, dan hal empirik lainnya. Alasan peneliti menggunakan grand teori ini, karena teori ini dapat mengayomi perkembangan teori lainnya dan sebagai induk dari teori pelayanan publik. Berbicara tentang pendekatan teoritis dalam ilmu administrasi publik, dalam perkembangannya kita mengenal dengan 2 pendekatan yang telah sama sama diaplikasikan pada

era reformasi birokrasi. Pendekatan tersebut adalah NPM (New Public Manajemen) dan NPS (New Public Service).

New Public Management

NPM merupakan teori manajemen publik yang beranggapan bahwa praktik manajemen sektor swasta adalah lebih baik dari praktik manajemen sektor publik. Oleh karena itu untuk memperbaiki kinerja sektor publik perlu diadopsi beberapa praktik dan teknik manajemen. (Maesschalck, 2004) Konsep New Public Management pada dasarnya mengandung tujuh komponen utama, yaitu: Manajemen profesional di sektor public. Adanya standar kinerja dan ukuran kinerja, Penekanan yang lebih besar terhadap pengendalian output dan outcome, Pemecahan unit-unit kerja di sektor public, Menciptakan persaingan di sektor publik, Pengadopsian gaya manajemen di sektor bisnis ke dalam sektor publik, penekanan pada disiplin dan penghematan yang lebih besar dalam menggunakan sumber daya. Seiring perkembangannya, pendekatan manajerial modern tersebut memiliki banyak sebutan, misalnya: managerialism, new public management, market-based public management, post-bureaucratic paradigm, dan entrepreneurial government. Istilah yang kemudian banyak dipakai dan dikenal adalah new public management. Sebelum menerapkan konsep NPM, pemerintah menggunakan model administrasi publik yang lebih menekankan pada birokrasi. New Public Management (NPM) merupakan teori baru manajemen publik yang beranggapan bahwa praktik manajemen sektor swasta adalah lebih baik dibandingkan dengan praktik manajemen sektor publik.

New Public Service, adalah paradigma baru dari Ilmu Administrasi Negara yang pada intinya paradigma ini menekankan pada revitalisasi kedudukan masyarakat sebagai warga negara yang mempunyai hak untuk dilayani (Herizal et al., 2020). Kondisi masyarakat yang demikian menuntut hadirnya pemerintah yang mampu memenuhi berbagai tuntutan kebutuhan dalam segala aspek kehidupan mereka, terutama dalam mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya dari pemerintah. Pemberian pelayanan yang memenuhi standar yang telah ditetapkan memang menjadi bagian yang perlu dicermati. Sondakh, (2015).

Saat ini masih sering dirasakan bahwa kualitas pelayanan minimum sekalipun masih jauh dari harapan masyarakat. Yang lebih memprihatinkan lagi, masyarakat hampir sama sekali tidak memahami secara pasti tentang pelayanan yang seharusnya diterima dan sesuai dengan prosedur pelayanan yang baku oleh pemerintah. Masyarakat pun enggan mengadukan apabila menerima pelayanan yang buruk, bahkan hampir pasti mereka pasrah menerima layanan seadanya. Kenyataan semacam ini terdorong oleh sifat public goods menjadi monopoli pemerintah khususnya dinas/instansi pemerintah daerah dan hampir tidak ada pembanding dari pihak lain (Herawati & Mulyani, 2018). Praktek semacam ini menciptakan kondisi yang merendahkan posisi tawar dari masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan dari pemerintah, sehingga memaksa masyarakat mau tidak mau menerima dan menikmati pelayanan yang kurang memadai tanpa protes. Walaupun demikian tampaknya the new public service mempunyai normatif model yang bisa dibedakan dengan konsep yang lainnya. Lahirnya konsep ini memang tidak bisa di pisahkan dengan pendahulunya. Ide dasar dari konsep ini dibangun dari konsep konsep; (1) teori democratic citizen ship; (2) model komunitas dan civil society; (3) organisasi humanism; (4) post modern ilmu administrasi public.

Penelitian ini menggunakan Goal-Setting Theory yang dikemukakan oleh (Fried & Slowik, 2004) sebagai teori utama (grand theory). Goal-Setting Theory menekankan pada pentingnya hubungan antara tujuan yang ditetapkan dan kinerja yang dihasilkan. Hal ini Peneliti kemukakan dengan pertimbangan bahwa Organisasi atau Perusahaan yang melaksanakan fungsi managerial memiliki visi dan misi serta tujuan. Goal setting Theory sebagai grand theory diasumsikan memiliki daya konseptual yang kuat antara kebijakan, dan motivasi Karyawannya. Konsep dasar teori penetapan tujuan adalah bahwa seseorang yang memahami tujuan (apa yang diharapkan organisasi kepadanya) akan mempengaruhi perilaku kerjanya (Lunenburg, 2011).

Capaian atas sasaran (tujuan) yang ditetapkan dapat dipandang sebagai tujuan atau tingkat kinerja yang ingin dicapai oleh individu. Tujuan yang tidak jelas sering mengakibatkan individu tidak yakin akan apa yang benar-benar dibutuhkan dari mereka dan dapat memiliki konsekuensi perilaku yang tidak menguntungkan (Sari & Hadijah, 2016). Setiap perusahaan yang telah menetapkan sasaran maka mudah

untuk mencapai target kinerjanya sesuai dengan visi dan misi perusahaan itu sendiri. Teori ini menegaskan bahwa individu dengan tujuan yang lebih spesifik akan lebih baik dibandingkan dengan tujuan yang tidak jelas, seperti tidak ada tujuan sama sekali

Teori *stewardship* merupakan suatu keadaan dimana manajer sebagai *steward* lebih berfokus pada kepentingan bersama atau tujuan organisasi bukan pada keinginan pribadi (Davis et al., 2018). Pada sebuah entitas prinsipal merasa kesulitan apabila melakukan pengelolaan organisasi sekaligus. Dalam kaitannya dengan organisasi yang bergerak di sektor publik maka *steward* atau manajer dinilai dapat dipercaya dan mampu bertanggung jawab atas tindakannya untuk memaksimalkan pelayanan terhadap prinsipal atau dalam hal ini disebut sebagai masyarakat. Pengimplementasian penelitian ini terhadap *stewardship theory* adalah rumah sakit sebagai instansi yang bergerak di sektor publik bertindak sebagai *steward* yang mampu melayani masyarakat dengan pelayanan kesehatannya dengan penuh tanggung jawab dan dapat dipercaya.

Setiap pihak yang memiliki hubungan dengan perusahaan sangat berkepentingan dengan kinerja perusahaan. Pentingnya pengukuran kinerja perusahaan dapat dijelaskan dengan dua teori yaitu teori keagenan (*agency theory*) dan teori sinyal (*signalling theory*). Pada teori keagenan (*agency theory*) dijelaskan bahwa pada sebuah perusahaan terdapat dua pihak yang saling berinteraksi. Pihak-pihak tersebut adalah pemilik perusahaan (pemegang saham) dan manajemen perusahaan. Pemegang saham disebut sebagai prinsipal, sedangkan manajemen orang yang diberi kewenangan oleh pemegang saham untuk menjalankan perusahaan yang disebut agen. Perusahaan yang memisahkan fungsi pengelolaan dan kepemilikan akan rentan terhadap konflik keagenan (*agency conflict*) yang disebabkan karena masing-masing pihak mempunyai kepentingan yang saling bertentangan, yaitu berusaha mencapai kemakmurannya sendiri. Untuk meminimalkan konflik antara mereka, maka pemilik dan manajemen melakukan kesepakatan kontrak kerja dengan cara mengatur proporsi hak dan kewajiban masing-masing guna mencapai utilitas yang diharapkan. menyatakan bahwa dalam kesepakatan tersebut diharapkan dapat memaksimalkan utilitas pemilik, dan dapat memuaskan serta menjamin manajemen untuk menerima reward atas hasil pengelolaan perusahaan. Adapun manfaat yang diterima oleh kedua belah pihak didasarkan atas kinerja perusahaan.

Menurut (Bulbulia & Sosis, 2011), teori sinyal (*signalling theory*) menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan kepada pihak eksternal. Dorongan tersebut timbul karena adanya informasi asimetris antara perusahaan (manajemen) dengan pihak luar, dimana manajemen mengetahui informasi internal perusahaan yang relative lebih banyak dan lebih cepat dibandingkan pihak luar seperti investor dan kreditor. Kurangnya informasi yang diperoleh pihak luar tentang perusahaan menyebabkan pihak luar melindungi diri dengan memberikan nilai rendah untuk perusahaan tersebut. Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan mengurangi informasi asimetris, salah satu caranya adalah dengan memberikan sinyal kepada pihak luar berupa informasi keuangan yang dapat dipercaya sehingga dapat mengurangi ketidakpastian mengenai prospek perusahaan pada masa yang akan datang. Laporan tentang kinerja perusahaan yang baik akan meningkatkan nilai perusahaan. Pada *signalling theory*, adapun motivasi manajemen menyajikan informasi keuangan diharapkan dapat memberikan sinyal kemakmuran kepada pemilik ataupun pemegang saham

Audit Internal merupakan kegiatan assurance dan konsultasi yang independen dan obyektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi (Manuaba & Muliarta RM, 2019). Audit internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya melalui pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan resiko, pengendalian, dan proses governance Sesuai dengan definisi dari The Institute of Internal Auditor (IIA), sebagai suatu profesi ciri utama auditor internal adalah kesediaan menerima tanggungjawab terhadap kepentingan pihak-pihak yang dilayani. Agar dapat mengemban tanggungjawab ini secara efektif, auditor internal perlu memelihara standar perilaku yang tinggi. Auditor Internal harus menunjukkan kejujuran, objektivitas, dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggungjawab profesinya. Auditor Internal harus menunjukkan loyalitas terhadap organisasinya atau terhadap pihak yang dilayani.

Namun demikian, auditor internal tidak boleh secara sadar terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang menyimpang atau melanggar hukum.

Anton Panjaitan, (2014) Auditor Internal hanya melakukan jasa-jasa yang dapat diselesaikan dengan menggunakan kompetensi professional yang dimilikinya. Auditor Internal harus mengusahakan berbagai upaya agar senantiasa memenuhi Standar Profesi Audit Internal, Auditor Internal harus bersikap hati-hati dan bijaksana dalam menggunakan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugasnya. Auditor Internal tidak boleh menggunakan informasi rahasia; untuk mendapatkan keuntungan Pribadi, secara melanggar hukum, atau yang dapat menimbulkan kerugian terhadap organisasinya. Dalam melaporkan hasil pekerjaannya, auditor internal harus mengungkapkan akan semua fakta-fakta penting yang diketahuinya, yaitu fakta-fakta yang jika tidak diungkap dapat; mendistorsi laporan atas kegiatan yang direview, atau menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar hukum. Auditor Internal harus senantiasa meningkatkan kompetensi serta efektifitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya.

Ruang lingkup atau cakupan (scope) pekerjaan internal audit adalah seluas fungsi manajemen, sehingga cakupannya meliputi bidang finansial dan non finansial. Audit finansial merupakan jenis audit yang lebih berorientasi (focus) pada masalah keuangan. Sasaran audit keuangan adalah kewajaran atas laporan keuangan yang telah disajikan manajemen. Pada saat ini orientasi internal auditor tidak pada masalah audit keuangan saja, namun titik berat lebih difokuskan pada audit operasional di perusahaan. Audit Operasional adalah audit manajemen (management audit) atau audit kinerja (performance auditing). Sasaran dari audit operasional adalah penilaian masalah efisiensi, efektivitas dan ekonomis (3E). Audit ketaatan / kepatuhan (compliance audit) adalah suatu audit yang bertujuan untuk menguji apakah pelaksanaan / kegiatan telah sesuai dengan ketentuan / peraturan yang berlaku. Selain internal auditor, compliance audit juga dapat dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan pengawasan keuangan dan Pembangunan (BPKP). Bagi perusahaan yang telah mendapatkan ISO 19000 dan sejenisnya, compliance audit perlu dilakukan oleh auditor ISO dalam rangka mempertahankan sertifikat ISO yang telah diraih perusahaan tersebut.

Quraini & Rimawati, (2018) Audit kecurangan (Fraud audit) adalah audit yang ditujukan untuk mengungkap adanya kasus yang berindikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang merugikan perusahaan / negara dan menguntungkan pribadi maupun kelompok (organisasi) atau pihak ketiga. Istilah lain dari fraud audit adalah audit khusus atau audit investigasi (investigative audit). Dalam fraud audit, internal auditor perlu membuat bagan arus (flow chart) serta modus operandi berupa uraian tentang cara-cara melakukan tindak kejahatan (tindak pidana korupsi). Perkembangan Fraud audit pada saat ini cukup pesat, misalnya untuk mengungkap adanya fraud dibidang keuangan diperlukan ilmu mengenai akuntansi forensic (forensic accounting) dalam kejahatan keuangan di perusahaan, seperti halnya dalam ilmu kedokteran terdapat bedah forensik untuk mengungkap penyebab terjadinya kematian seseorang.

Terdapat beberapa perbedaan pokok antara audit internal dan audit eksternal sebagai berikut:

Tabel 2. Perbedaan Internal Audit dan Eksternal Audit

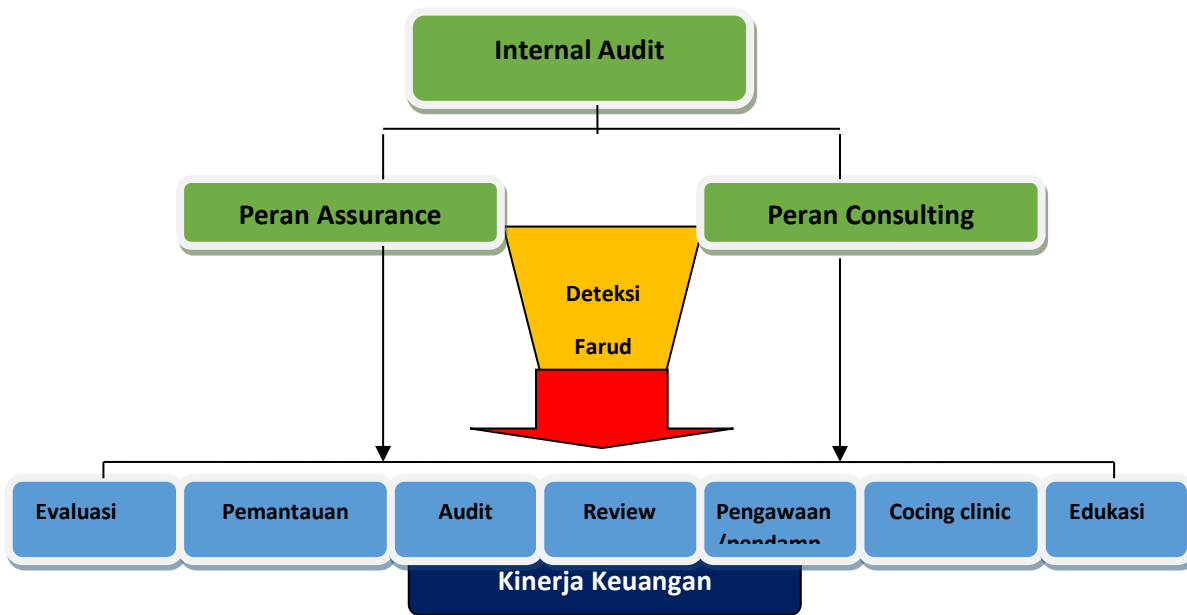
No	Aspek	Internal Audit	Eksternal Audit
1	Konsumen	Menejer & Komite Audit	Pemegang saham, Stock holder
2	Fokus	Resiko Usaha	Resiko Lap. Keuangan
3	Orientasi	Saat ini dan akan datang	Yang lalu sampai saat ini
4	Pengendalian	Langsung	Tidak langsung
5	Kecurangan	Langsung	Tidak langsung
6	Kebebasan	Objektivitas	Berdasar Status
7	Kegiatan	Kegiatan yang sedang berjalan	Tiap Perode Akuntansi

Menurut (Trianto, 2017) Kinerja adalah keluaran yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau indikator-indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam waktu tertentu. pekerjaan yang dicapai seorang berdasarkan persyaratan-persyaratan pekerjaan (*job requirement*). (Nurhayati et al., 2019)

menyatakan “ penilaian kinerja keuangan adalah suatu penilaian yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan serta menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangannya secara baik dan benar”. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah prestasi yang dicapai dengan penilaian perusahaan yang telah diselesaikan dengan standar kerja yang telah ditetapkan.

Menurut KEPMENKES Nomor 1164/MENKES.SK/X/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit Badan Layanan Umum, kinerja keuangan merupakan salah satu dimensi pengukuran dari mekanisme pengukuran kinerja BLU dan BLUD. beberapa kelompok Rasio Indikator Kinerja Keuangan BLU diantaranya: Rasio Likuiditas, Rasio Aktivitas, Rasio Profitabilitas, dan Rasio Struktur Modal. Rasio Likuiditas digunakan untuk mengetahui kemampuan rumah sakit dalam memenuhi seluruh kewajiban jangka pendeknya. Rasio Aktivitas digunakan untuk mengetahui kemampuan rumah sakit dalam mengelola asset dan sumber daya yang dimiliki. Rasio Profitabilitas digunakan untuk mengukur sejauh kemampuan rumah sakit memperoleh laba dari kegiatan pelayanan sehari-hari. Dan Rasio Struktur Modal digunakan untuk mengetahui pembiayaan rumah sakit akan asset yang dimiliki.

Model penelitian dapat dikonseptualkan pada gambar 1 berikut ini:



Metode Penelitian

Penelitian kami menggunakan pendekatan metode penelitian deskriptif kualitatif berupa observasi dan wawancara, dimana penelitian kami akan menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan dan perilaku yang dapat diamati oleh peneliti untuk kemudian mendiskripsikan masalah tersebut. Penelitian kami dilaksanakan di Rumah Sakit Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba, yang beralamat di Jl. Daeng Raja Bulukumba Adapun waktu yang kami dibutuhkan dalam penelitian ini adalah 2 bulan terhitung sejak proposal ini diterima yaitu bulan September sampai dengan November 2020.

Untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik yaitu: mengidentifikasi sebuah topik atau fokus, melakukan tinjauan pustaka untuk mengidentifikasi informasi penting yang terkait dengan topik penelitian, pemilihan lokasi penelitian yang relevan dengan topik penelitian, menyampaikan dengan baik dan jelas maksud yang berkaitan dengan topik penelitian, menulis pertanyaan bayangan (foreshadow question) yang dirancang sebelumnya, pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan analisis dokumen, analisis data melalui membaca, mereview alat untuk mendeteksi tema-tema dan pola-pola yang muncul, dan interpretasi dan diseminasi hasil. Informan yang kami digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa pejabat yang memiliki kapasitas untuk memberikan penjelasan terkait wawancara mendalam yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Daftar jumlah Informan

No	Jabatan	Jumlah
1	Direktur	1
2	Wakil Direktur	2
3	SPI	1
3	Kabag Keuangan	1
	Jumlah	6

Berdasarkan jenis data yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembahasan, dan analisis. Jenis data yang kami digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data berupa informasi, baik secara lisan maupun tulisan yang bergubungan dengan penelitian ini. Selain jenis data, sumber data yang kami digunakan dalam penelitian ini terbagi atas dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari Internal audit Rumah sakit Sulthan Daeng Radja. Kabupaten Bulukumba. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang relevan dengan tujuan penelitian, jurnal, buku, peraturan pemerintah, dan artikel.

Teknik pengumpulan data yang kami digunakan untuk memperoleh data yang relevan yaitu dengan cara: melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik wawancara dilakukan dengan cara dilakukan dengan cara terfokus dengan lebih awal menyiapkan bahan pertanyaan yang bersifat terstruktur, dan mendalam. Teknik observasi dilakukan dengan cara melakukan observasi langsung dilokasi penelitian dalam hal ini BLUD RS Sulthan Daeng Radja dan pengamatan langsung terhadap pelayanan atau ektifitas keseharain di RS, yang terkait dengan topik penelitian. Dan teknik dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dan meneliti data yang bersumber dari RS Sulthan Daeng Radja yang ditelitti sebagaimana dikemukakan oleh Yin (1996) apa yang sudah dilakukan oleh suatu organisasi maupun masyarakat bisa dilacak dengan menggunakan jejak, yakni dokumen arsip.

Teknik analisa data yang kami digunakan dalam penelitian ini adalah yaitu: mengumpulkan data dan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian, mereduksi data dengan memilih dan menyederhanakan data-data yang ada dan yang penting dengan memfokuskan pada hal-hal yang pokok, penyajian data degan menyusun data berupa teks naratif dan bagan sedemikian rupa sehingga memudahkan untuk menarik sebuah kesimpulan dan yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian

Tabel 4. Komposisi Informan Penelitian

Paro, Mas'ud & Ahmad
Analisis Internal Audit Terhadap Pencegahan Fraud

No	Nama	Jabatan
1	dr.H. Rizal Ridwan Dappi, SP.OG (K), M.Kes	Plt Direktur
2	Saharuddin Saing, SE, MM, M.Kes	Wadir Umum
3	Haeruddin, SE	Kepala Bagian Keuangan
4	dr. Andi Nisfawati	Ketua SPI
5	Rizky Amaliah Yahya, S.ST , M.Ak	Keuangan

Berdasarkan tabel 4 maka komposisi dari informan dalam penelitian ini sebanyak 5 orang yang dianggap kapabel dalam memberikan dukungan penelitian dalam hal ini adalah wawancara yang akan dilakukan. Pemeriksa internal rumah sakit merupakan salah satu kegiatan manajemen rumah sakit yang penting dalam rangka mewujudkan tata kelola rumah sakit yang baik (*good corporate governance*). Kegiatan pemeriksaan internal dimaksudkan untuk memastikan terlaksananya penyelenggaraan tata kelola rumah sakit yang baik, efisien dan efektif serta ekonomis sesuai dengan standar yang berlaku. Kegiatan pemeriksaan internal Rumah sakit dilaksanakan oleh Satuan Pemeriksa Internal Rumah Sakit yang khusus dibentuk untuk itu. SPI merupakan salah satu unsur organisasi non struktural bertugas melaksanakan pemeriksaan internal kinerja Rumah Sakit meliputi pelaksanaan manajemen pelayanan, penunjang, umum dan sumber daya manusia, serta pengawasan manajemen keuangan. Agar dalam pelaksanaan pemeriksaan internal di Rumah Sakit dapat berjalan sesuai standar pemeriksaan internal yang berlaku, perlu ditetapkan suatu pedoman teknis yang dapat dijadikan acuan oleh SPI Rumah Sakit yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan.

Tujuan Satuan Pemeriksaan Internal

SPI memegang peran dan tanggungjawab yang sangat penting dalam sebuah rumah sakit. Adapun tujuan dari eksistensi SPI dalam rumah sakit diantaranya yaitu: 1. Memastikan adanya data dan informasi yang dapat dipercaya untuk digunakan sebagai keperluan baik intern maupun laporan ekstern 2. Memastikan kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, hukum dan peraturan. 3. Melindungi asset dan atau kepentingan Rumah Sakit. 4. Pencapaian tujuan dan sasaran untuk operasi dan program yang telah disusun oleh Rumah Sakit. 5. Penggunaan dana secara ekonomis dan efisien.

Ruang Lingkup Kerja Satuan Pemeriksaan Internal

Ruang lingkup SPI berkaitan dengan cakupan dari tugas SPI dalam melaksanakan pemeriksaan internal pada rumah sakit. Ruang lingkup tersebut terdiri dari: 1. Penilaian mengenai kelayakan dan kecukupan pengendalian dibidang keuangan, dan kegiatan lainnya serta peningkatan efektifitas pengendalian dengan biaya yang layak. 2. Pemeriksaan untuk memastikan bahwa semua kebijakan, rencana dan prosedur telah benar-benar ditaati. 3. Pemeriksaan untuk memastikan bahwa semua harta milik Rumah Sakit telah dipertanggungjawabkan dan dijaga dari semua kerugian. 4. Pemeriksaan bahwa data informasi yang disajikan kepada manajemen dapat dipertanggungjawabkan dan dipercaya. 5. Penilaian mengenai mutu pelaksanaan tugas tiap unit kerja dalam melaksanakan tanggung jawabnya. 6. Memberikan rekomendasi mengenai perbaikan di bidang operasional, dan bidang lainnya.

Fungsi SPI

Adapun fungsi dari SPI diantaranya yaitu: 1. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko di unit kerja rumah sakit. 2. Penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, dan pemantauan efektifitas dan efisiensi sistem dan prosedur dalam bidang administrasi pelayanan, serta administrasi umum dan keuangan. 3. Pelaksanaan tugas khusus dalam lingkup pengawasan intern yang ditugaskan oleh Kepala Rumah Sakit. 4. Pemantauan pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas

laporan hasil pemeriksa internal dan 5. Pemberian konsultasi, advokasi, pembimbingan, dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan operasional rumah sakit.

Program Pemeriksaan Tahunan

Program Pemeriksaan Tahunan didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, tidak tumpang tindih dan pemeriksaan internal berulang-ulang, serta memperhatikan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya dalam melakukan Pemeriksaan Internal yang meliputi:

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko pada unit kerja di rumah sakit untuk menilai bahwa: 1. Unit kerja di Rumah sakit telah mengidentifikasi risiko-risiko dan telah dianalisis sesuai dengan pedoman yang berlaku. 2. Manajemen telah menyediakan sistem pengendalian internal terhadap berbagai risiko. 3. Risiko dan tindakan pengendaliannya telah direviu secara berkala. 4. Penilaian penerapan mencakup penilaian atas maturasi manajemen risiko organisasi.

Penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, dan pemantauan efektifitas dan efisiensi sistem dan prosedur dalam bidang administrasi umum dan keuangan, mencakup semua hal yang berpotensi: 1. menggagalkan pencapaian tujuan organisasi. 2. menimbulkan kerugian finansial, pemborosan, ketidakamanan atas asset rumah sakit. 3. merugikan citra rumah sakit, atau dapat menimbulkan kasus hukum yang merugikan.

Pelaksanaan tugas khusus dalam lingkup pengawasan internal yang ditugaskan oleh kepala rumah sakit atau direktur rumah sakit, hal ini dapat berupa: penugasan khusus oleh kepala rumah sakit atau direktur rumah sakit harus dibuat secara tertulis dan dalam hal pelaksanaan tugas khusus tersebut tumpang tindih dengan unit kerja lain di rumah sakit harus dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan unit kerja lain tersebut.

Setelah melaksanakan pemeriksaan internal dan tugas khusus dalam lingkup pengawasan internal yang ditugaskan oleh kepala rumah sakit atau direktur rumah sakit, maka tim pemeriksa internal harus membuat laporan hasil pemeriksaan internal. Penyusunan laporan memuat seluruh gambaran kondisi obyek pemeriksaan yang relevan, kriteria yang seharusnya, keterangan penyebab ketidaksesuaian dan akibat yang ditimbulkan dari ketidaksesuaian tersebut, serta rekomendasi dari tim pemeriksa internal. Pelaporan hasil pemeriksaan internal, disusun dan dikomunikasikan terlebih dahulu kepada pejabat yang bertanggungjawab langsung dengan obyek pemeriksaan internal. Rekomendasi tim pemeriksa internal harus relevan dengan upaya perbaikan dikemudian hari dan pertanggungjawaban dari pejabat yang terkait. Pelaporan dari Tim pemeriksa internal harus memuat pernyataan bahwa proses pemeriksaan internal telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Kerja Pemeriksa internal dan jaminan atas tersedianya bukti-bukti pemeriksaan internal.

Pemberian konsultasi, advokasi, pembimbingan, dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan operasional rumah sakit dapat berupa: dilakukan secara rutin atau atas permintaan unit kerja di Rumah Sakit dan dapat dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan unit kerja terkait di Rumah Sakit.

Rencana Kegiatan Pemeriksa Internal

Setiap akan melaksanakan kegiatan pemeriksaan internal, SPI harus merencanakan langkah-langkah kegiatan yang disusun sebagai Program Kerja Pemeriksa (PKP) yang meliputi: rencana tahap survei pendahuluan (jika diperlukan), Evaluasi Sistem Pengendalian Manajemen (ESPM), Pendalaman temuan dan rencana penyelesaian laporan hasil pemeriksa internal internal. Program Kerja Pemeriksa i internal (PKP) memuat tujuan setiap kegiatan pemeriksa internal, rincian langkah kerja, nama pemeriksa internal yang akan melaksanakan, rencana dan realisasi tanggal pelaksanaan, kesimpulan tim pemeriksa internal, ditanda tangani oleh Ketua Tim Pemeriksa internal dan di setujui Pengendali Teknis.

Pelaksanaan Pemeriksaan Internal

Terdapat 6 langkah yang harus dilakukan sebelum pelaksanaan pemeriksaan internal, yaitu:

1. Persetujuan Direktur atau Kepala Rumah Sakit, Tim pemeriksa internal harus melaporkan rencana kegiatan yang akan dilakukan secara tertulis kepada kepala Rumah Sakit atau direktur Rumah Sakit. Persetujuan diperoleh dari kepala atau direktur Rumah Sakit diperlukan sebagai dasar kegiatan yang akan dilakukan oleh Tim pemeriksa internal, dan dilengkapi dengan Surat Tugas pemeriksaan internal atas satu obyek atau kegiatan tertentu. Penyusunan rencana langkah kegiatan pemeriksa internal yang telah disetujui oleh Kepala SPI, paling sedikit berisikan tujuan pemeriksa internal, nama pemeriksa internal yang melakukan pemeriksaan, obyek pemeriksaan internal, sasaran pemeriksaan internal, lingkup pemeriksa internal, periode pemeriksa internal, langkah kerja pemeriksa internal, dan waktu pelaksanaan.
2. Komunikasi Pemeriksaan Internal, Tim pemeriksa harus mengkomunikasikan rencana pemeriksaan yang ditugaskan oleh Kepala Rumah sakit atau Direktur Rumah Sakit secara tertulis.
3. Langkah-langkah kegiatan pemeriksaan yang akan dilaksanakan, dikomunikasikan kepada pimpinan rumah sakit dan dijelaskan kepada pejabat teknis yang akan diperiksa.
4. Rencana pertanyaan (kuesioner) yang akan diajukan kepada objek pemeriksaan, dan jadwal kerja.
5. Mekanisme pemeriksaan yang akan dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa, meliputi jenis dokumen yang diperiksa, laporan, transaksi, keterangan dan informasi lain yang diperlukan, proses pengujian kebenaran data, penelusuran, penjejagan bukti-bukti transaksi yang relevan yang nantinya mendukung pernyataan Tim Pemeriksa internal.
6. Langkah kegiatan pemeriksaan sesuai dengan informasi yang telah dikomunikasikan kepada kepala Rumah Sakit atau direktur Rumah Sakit, meliputi langkah kegiatan persiapan, survey pendahuluan, evaluasi sistem pengendalian manajemen, pengembangan temuan, dan tahap pelaporan.

Adapun tehnik yang dapat digunakan dalam pemeriksaan yang dilakukan SPI yaitu: Membandingkan, Pemeriksaan atas bukti tertulis / Rekonsiliasi, Konfirmasi, Analisis, Cheking, Inspeksi, Transir, Scanning dan Rekomputasi. Sedangkan dalam melakukan pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan SPI, terdapat hal hal yang harus dipersiapkan terlebih dahulu diantaranya: mempersiapkan kertas kerja pemeriksaan, mengumpulkan bukti-bukti pendukung pemeriksaan, bukti fisik yang diperoleh melalui pengukuran dan perhitungan fisik, pemotretan atau dapat juga berupa berita acara pemeriksaan fisik. Bukti dokumen yang berupa surat kontrak, salinan dari catatan serta dokumen lainnya. Bukti kesaksian yang diperoleh melalui tanya jawab tertulis atau pernyataan dari pihak yang bersangkutan dengan permasalahannya dan bukti analisis yang merupakan hasil olahan dari berbagai informasi yang diperoleh pemeriksa.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

Sarana untuk mengkomunikasikan hasil pekerjaan auditor kepada berbagai pihak baik intern maupun ekstern, sekaligus sebagai sarana untuk menilai dan mengevaluasi kontribusi yang diberikan oleh pemeriksa/ auditor. Fungsi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) meliputi: kesimpulan berdasarkan hasil audit, pengungkapan kondisi, kerangka acuan untuk tindakan, manajemen (rekomendasi) dan penjelasan pandangan obyek audit.

Timbulnya Fraud di Rumah Sakit

Menurut Ali Akbar (2019) menyatakan bahwa di lingkungan rumah sakit timbul fraud karena:

1. Rendahnya gaji tenaga medis. 2. Sistem layanan kesehatan dan beban layanan kesehatan yang tidak seimbang. 3. Pemberian insentif yang tidak memadai dari penyedia layanan. 4. Pasokan peralatan medis yang kurang. 5. Sistem yang tidak efisien dan 6. Pemberian fasilitas kesehatan yang tidak transparan Faktor budaya.

Efektivitas peran internal auditor dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan sangat tergantung pada besar kecilnya status kewenangan yang dimiliki dan mekanisme pelaporan hasil investigasi kecurangan yang dapat dijalankan, karena belum semua jajaran direksi mau memberikan kewenangan penuh dalam proses pencegahan, pendeteksian dan investigasi kecurangan pada internal auditor. Standar Profesi Audit Internal (1210.2) menyatakan bahwa internal audit harus memiliki pengetahuan yang memadai untuk dapat mengenali, meneliti, dan menguji adanya indikasi kecurangan. Sejalan dengan hal tersebut, pernyataan standar internal audit (SIAS) No. 3 menyatakan bahwa internal audit diwajibkan untuk mewaspadai kemungkinan terjadinya ketidakwajaran penyajian, kesalahan, penyimpangan, kecurangan, inefficiency, konflik kepentingan dan ketidakefektifan pada suatu aktivitas perusahaan, pada saat pelaksanaan audit. Audit internal juga diminta untuk menginformasikan kepada pejabat yang berwenang dalam hal diduga telah terjadi penyimpangan, dan menindaklanjutinya untuk meyakinkan bahwa tindakan yang tepat telah dilakukan untuk memperbaiki masalah yang ada. Adapun uraian peranan audit internal dalam menangani kecurangan di Rumah sakit Sulthan Daeng Radja kabupaten Bulukumba.

Pembahasan

Preventing Fraud (mencegah kecurangan)

Fraud dimulai dari jumlah kecil yang tidak signifikan, dan jika tidak ketahuan maka akan terus berlanjut ke jumlah yang lebih besar. Kejadian yang membuat pelaku merasa ketakutan atau terancam akan membuatnya menghentikan tindakan fraud, tapi nantinya fraud akan berlanjut lagi jika pelaku merasa keadaan sudah kembali aman.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Plt Direktur Rumah sakit Sulthan Daeng Radja dijabarkan bahwa :

Fraud itu dapat terjadi dimana-mana, di Perusahaan, Pemerintahan, dan organisasi manapun, termasuk seperti Rumah Sakit. Kejadian fraud ini disebabkan oleh banyak faktor, tapi yang utama adalah niat untuk memperkaya diri sendiri dan atau kelompok yang saling terkait". (wawancara tanggal 24-1-2021).

Untuk mengatasi terjadinya fraud pada rumah sakit Sulthan Daeng Radja, maka pengendalian internal harus dilaksanakan dengan baik, internal audit juga harus melaksanakan tugas dengan baik dan benar. Hal ini diperkuat dengan pandangan dari Direktur Umum RS. Sulthan Daeng Radja yang mengatakan bahwa:

"Internal audit memegang peran yang sangat strategis dalam sebuah rumah sakit, karena Rumah sakit sebagai BLUD, memiliki cakupan pekerjaan yang luas, dan berpotensi dilakukannya fraud oleh para oknum". Sebab dengan adanya Audit internal maka mudah bagi pihak manajemen dalam mendeteksi adanya gejala kecurangan, dan penyalahgunaan di berbagai lini manajemen."

Pandangan diatas sesuai dengan temuan penelitian seperti Firmansyah (2020), Yessy Aryanti Lestari, Yustrida Bernawati (2020), Dwi Zarlis (2018), Dewi Novita Wulandari, Muhammad Nuryatno (2018), Senda Y. Leatemia Nickita F. Febryanti (2020), Yarry Septia Larasati (2019), yang menemukan bahwa terdapat pengaruh signifikan pengendalian interen terhadap pencegahan Fraud di berbagai rumah sakit yang diteliti.

Salah satu cara menemukan indikasi kecurangan adalah dengan menggunakan sistem Akuntansi forensik, yaitu dengan cara memeriksa transaksi yang mencurigakan pada laporan keuangan, baik nominal yang besar maupun yang kecil. Sementara metode sistem informasi adalah dengan cara melakukan perbandingan profil kecurangan yang dapat terjadi, meliputi: motivasi, kesempatan, objek fraud, metode fraud, indikasi fraud dan konsekuensi yang diterima organisasi.

Detecting Fraud (mendeteksi kecurangan)

Para internal auditor dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan diatur secara jelas dalam kewenangan pelaporan dan standar profesi. Komisi Treadway (*the Treadway Commission*, 1987) merekomendasikan bahwa internal auditor harus berperan aktif dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan. Demikian pula dalam Pernyataan Standar Internal Audit mensyaratkan bahwa internal auditor harus berperan aktif dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan dengan mengidentifikasi tanda-tanda kemungkinan terjadinya kecurangan, menginvestigasi gejala kecurangan dan melaporkan temuannya pada komite audit atau kepada tingkat manajemen yang tepat.

Dalam hal ini Internal audit pada RS. Sulthan Daeng Radja sudah melaksanakan kiat untuk mendeteksi adanya gejala kecurangan. Hal ini juga diakui oleh Kepala SPI, bahwa: *SPI RS. Sulthan Daeng Radja memiliki SOP dalam upaya mendeteksi kecurangan disemua uni Rumah Sakit, seperti yang selama ini terjadi. Misalnya dalam hal anggaran belanja, pelayanan medik, dan pengadaan Alkes, dimana kegiatan tersebut sangat rawan dengan Fraud, sehingga SPI pasti memiliki kiat tersendiri dalam menemukan adanya gejala Fraud. (Wawancara 24-1-21).*

Investigating Fraud (melakukan investigasi kecurangan)

Berkenaan dengan peran dan tanggung jawab sebagaimana diuraikan di atas, Pernyataan Standar Internal Auditor (SIAS) No.3 menguraikan mengenai tanggung jawab internal auditor untuk pencegahan kecurangan, yaitu memeriksa dan menilai kecukupan dan efektivitas system pengendalian intern, berkaitan dengan pengungkapan risiko potensial pada berbagai bentuk kegiatan/operasi organisasi. Tindakan investigasi adalah proses penyelidikan sehingga didapatkan pembuktian yang cukup. Tindakan-tindakan pengawasan tersebut adalah cara untuk mengatasi kecurangan sehingga kehilangan keuangan negara dapat terus ditekan dan pada akhirnya tercapai tujuan untuk menghilangkan kebocoran dan kerugian negara.

Hambatan yang timbul dalam Menemukan Kecurangan (*fraud*) di Sektor Publik

Kondisi lingkungan kerja, tak dapat dipungkiri sangat besar mempengaruhi seorang pegawai untuk melakukan fraud, apalagi jika hal tersebut berkenaan dengan keuangan kantor. Masih kurangnya lingkungan kerja yang menciptakan budaya kejujuran, keterbukaan, dan member dukungan. Terdapat 3 (tiga) faktor utama penghambat dalam pencegahan fraud yang berkaitan dengan menciptakan budaya kejujuran, keterbukaan, dan bantuan. Berikut ketiga faktor tersebut. Terdapat 5 (lima) metode dalam mengeliminasi kesempatan yang dapat memicu seseorang untuk melakukan fraud. Berikut pemaparan mengenai kelima metode tersebut yaitu: Belum memiliki pengendalian internal yang baik. Terbukanya peluang kerjasama diantara pegawai dan pelanggan atau pemasok dan menginformasikan secara jelas kepada pemasok dan pihak lain di luar perusahaan mengenai kebijakan perusahaan terkait fraud. Masih rendahnya pengawasan pegawai dan pemerintah belum mengedektifkan whistleblowing system. Tahapan auditing secara proaktif belum sepenuhnya terlaksana. Hambatan dalam pencegahan tindakan fraud di tubuh RS. Sulthan Daeng Radja dapat diatasi dengan melakukan audit terhadap fraud secara proaktif akan meningkatkan kesadaran di antara pegawai bahwa tindakan mereka selalu ditinjau. Dengan meningkatnya ketakutan akan ketahuan tertangkap, auditing secara proaktif akan mengurangi keinginan untuk melakukan fraud.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka peneliti dalam kesempatan ini memberikan beberapa simpulan diantaranyaL Peran dan tanggungjawab Internal Audit dalam mencegah terjadinya Fraud telah berjalan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa BLUD sebagai Badan Layanan Milik Pemerintah Daerah, telah berupaya menerapkan penguatan terhadap SPI, dalam melaksanakan tugas pengawasan. Dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam mencegah terjadinya Fraud adalah, masih kurangnya kesadaran pegawai, masih lemahnya pengawasan dari Pemerintah. Disarankan kepada Pimpinan Rumah Sakit, agar dapat meningkatkan kualitas auditor internalnya, melalui pelatihan dan pengembangan potensi SDM, sehingga dalam melaksanakan tugas audit, mereka dapat memberikan kontribusi yang positif dalam mewujudkan tata kelola Rumah Sakit akuntabel.

Referensi

- Anton Panjaitan, B. J. (2014). PENGARUH MOTIVASI, STRES, DAN REKAN KERJA TERHADAP KINERJA AUDITOR (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di DKI Jakarta). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 5(1), 1–18.
- Arfah, E. A. (2011). Pengaruh Penerapan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang Dan Implikasinya Pada Kinerja Keuangan (Studi pada Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta di Kota Bandung). Jurnal Investasi, 7(2), 137–153.
- Arianie, G. P., & Puspitasari, N. B. (2017). Perencanaan Manajemen Proyek dalam Meningkatkan Efisiensi dan Efektifitas Sumber Daya Perusahaan (Studi Kasus : Qiscus Pte Ltd) Project Management Planning in Increasing the Efficiency and Effectiveness of Company Resources (Case Study: Qiscus Pte Ltd). J@ti Undip : Jurnal Teknik Industri, 12(3), 189.
- Bulbulia, J., & Sosis, R. (2011). Signalling theory and the evolution of religious cooperation. Religion, 41(3), 363–388. <https://doi.org/10.1080/0048721X.2011.604508>
- Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (2018). Toward a stewardship theory of management. Business Ethics and Strategy, Volumes I and II, 22(1), 473–500. <https://doi.org/10.4324/9781315261102-29>
- Fried, Y., & Slowik, L. H. (2004). Enriching Goal-Setting Theory with Time: An Integrated Approach. The Academy of Management Review, 29(3), 404. <https://doi.org/10.2307/20159051>
- Herawati, H., & Mulyani, D. (2018). PENGARUH KUALITAS BAHAN BAKU DAN PROSES PRODUKSI TERHADAP KUALITAS PRODUK PADA UD. TAHU ROSYDI PUSPAN MARON PROBOLINGGO. Universitas Panca Marga Probolinggo, 463–482.
- Herizal, H., Mukhrijal, M., & Wance, M. (2020). Pendekatan Akuntabilitas Pelayanan Publik Dalam Mengikuti Perubahan Paradigma Baru Administrasi Publik. Journal of Governance and Social Policy, 1(1), 24–34. <https://doi.org/10.24815/gaspol.v1i1.17327>
- Komariyatun, Purnami, C. T., & Warsito, B. E. (2014). Analisis Pengaruh Persepsi Perawat Pelaksana tentang Manajemen Keperawatan dan Lingkungan Kerja terhadap Kepuasan Kerja Perawat di Ruang Rawat Inap RSUD Tugurejo Semarang Analysis on the Influence of Nurses Perception in Nursing Management and General Hos. Manajemen Kesehatan Indonesia, 02(03), 242–252.
- Lunenburg, F. C. (2011). Goal-Setting Theory of Motivation. International Journal of Management, Business, and Administration, 15(1), 1–6. <http://www.nationalforum.com/Electronic Journal Volumes/Lunenburg, Fred C. Goal-Setting Theoryof Motivation IJMBA V15 N1 2011.pdf>
- Maesschalck, J. (2004). The impact of new public management reforms on public servants' ethics: Towards a theory. Public Administration, 82(2), 465–489. <https://doi.org/10.1111/j.0033-3298.2004.00403.x>
- Manuaba, I. A. D. P., & Muliarta RM, K. (2019). Pengaruh Audit Operasional dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Karyawan. E-Jurnal Akuntansi, 28, 322. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i01.p13>
- Nurhayati, E., Arifin, B., & Mulyasari, W. (2019). Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan Di Industri Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Dengan Competitive Advantage Sebagai Variabel Intervening. Tirtayasa Ekonomika, 14(1), 1. <https://doi.org/10.35448/jte.v14i1.5424>
- Pakadang, D. (2012). Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Kas Pada Rumah Sakit Gunung Maria Di Tomohon. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 1(4), 213–223.

Paro, Mas'ud & Ahmad
Analisis Internal Audit Terhadap Pencegahan Fraud

- Quraini, F., & Rimawati, Y. (2018). Determinan Fraudulent Financial Reporting Using Fraud. *Journal of Auditing, Finance, and Forensic Accounting (Jaffa)*, 6(2), 105–114.
- Romauli Situmeang, R. (2017). Pengaruh Pengawasan Dan Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Mitra Karya Anugrah. *Ajie*, 2(2), 148–160. <https://doi.org/10.20885/ajie.vol2.iss2.art6>
- Sadikin, H., & Adisasmito, W. (2016). Analisis Pengaruh Dimensi Fraud Triangle Dalam Kebijakan Pencegahan Fraud Terhadap Program Jaminan Kesehatan Nasional di RSUP Nasional Cipto Mangunkusumo. *Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia*, 1(2), 28–34. <https://doi.org/10.7454/eki.v1i2.1871>
- Sari, R. N. I., & Hadijah, H. S. (2016). Peningkatan Kinerja Pegawai Melalui Kepuasan Kerja Dan Disiplin Kerja. *Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran*, 1(1), 204. <https://doi.org/10.17509/jpm.v1i1.3389>
- Sondakh, C. (2015). Kualitas Layanan, Citra Merek Dan Pengaruhnya Terhadap Kepuasan Nasabah Dan Loyalitas Nasabah Tabungan (Studi Pada Nasabah Taplus BNI Cabang Manado). *Jurnal Riset Bisnis Dan Manajemen*, 3(1), 19–32.
- Trianto, A. (2017). Analisis Laporan Keuangan Sebagai Alat Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan Pada Pt. Bukit Asam (Persero) Tbk Tanjung Enim. *Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 8(03), 10.
- Wardhani, N. L. (2013). ANALISIS KINERJA KEUANGAN UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS BRAWIJAYA. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Yuyun, T. A. (2016). Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT . Pipit Mutiara Indah Di Desa Sekatak Buji Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan. *EJournal Administrasi Bisnis*, 4(2), 386–399. [http://ejournal.adbisnis.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/06/_artikel_ejournal_genap_yuyun_06-09-16-03-22-55\).pdf](http://ejournal.adbisnis.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/06/_artikel_ejournal_genap_yuyun_06-09-16-03-22-55).pdf)